

BAGIAN HUKUM

Yth. Bupati Lombok Utara Via Asisten Pemerintahan

Bersama ini kami kirimkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara.

**Tentang : Pembentukan Desa Menggala Kecamatan Pemenang
Kabupaten Lombok Utara**

Kepada Yth. Bapak Bupati

Mohon membubuhkan tanda tangan penetapan pada lembar tanda tangan pada Peraturan Daerah ini.

Kepada Yth. Bapak Sekretaris Daerah

Mohon membubuhkan:

- Paraf pada bagian kanan bawah setiap halaman Peraturan Daerah ini.
- Tanda tangan Pengundangan pada halaman terakhir Peraturan Daerah ini.

Nomor	:	8 tahun 2020
Tanggal	:	22 Juni 2020

TLU = 84

**Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Lombok Utara**



SUPARMAN, SH

NIP. 19750303 200701 1 017



BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA MENGGALA KECAMATAN PEMENANG
KABUPATEN LOMBOK UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan untuk meningkatkan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat perdesaan di Kabupaten Lombok Utara, maka dipandang perlu membentuk desa melalui pemekaran desa;
- b. bahwa dengan memperhatikan hasil kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan desa, maka sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu membentuk Desa Menggala Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Menggala Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

dan

BUPATI LOMBOK UTARA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA MENGGALA KECAMATAN PEMENANG KABUPATEN LOMBOK UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara.
5. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa atau bagian Desa yang bersandingan, atau pemekaran dari suatu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar Desa yang telah ada.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

9. Dusun adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintahan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan desa Menggala Kecamatan Pamenang Kabupaten Lombok Utara dalam rangka percepatan pemerataan pembangunan, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan pembentukan desa Menggala Kecamatan Pamenang Kabupaten Lombok Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa; dan
 - e. meningkatkan daya saing Desa.

BAB II PEMBENTUKAN NAMA, JUMLAH PENDUDUK, LUAS WILAYAH DAN CAKUPAN WILAYAH DESA

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Menggala Kecamatan Pamenang Kabupaten Lombok Utara.

Bagian Kedua Nama Desa, Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah

Pasal 4

- (1) Nama Desa adalah Desa Menggala.
- (2) Desa Menggala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemekaran dari Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang dengan nomor kode desa 52.08.05.2002.
- (3) Desa Menggala Kecamatan Pamenang pembentukannya melalui Desa persiapan yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 dan telah mendapat kode register 08.05.0002 pada tanggal 27 Januari 2017
- (4) Desa Menggala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jumlah penduduk sebesar 6.922 (enam ribu sembilan ratus dua puluh dua) Jiwa/ 2.133 (dua ribu seratus tiga puluh tiga) kepala keluarga.
- (5) Luas wilayah Desa Menggala sebesar 2.755 Ha² (dua ribu tujuh ratus lima puluh lima hektar per segi).

Pasal 5

Pusat Pemerintahan Desa Menggala berkedudukan di Dusun Jeruk Manis.

Bagian Ketiga Cakupan Wilayah Kerja

Pasal 6

- (1) Cakupan wilayah Desa Menggala meliputi:
 - a. Dusun Bentek;

- b. Dusun Koloh Berora;
 - c. Dusun Lebah Sari;
 - d. Dusun Pengempus Sari;
 - e. Dusun Kerujuk;
 - f. Dusun Kerujuk Barat;
 - g. Dusun Menggala;
 - h. Dusun Menggala Barat;
 - i. Dusun Menggala Timur, dan
 - j. Dusun Jeruk Manis
- (2) Cakupan wilayah Desa Menggala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Dengan terbentuknya Desa Menggala, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), wilayah Desa Pemenang Barat dikurangi dengan wilayah Desa Menggala sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III BATAS WILAYAH

Pasal 7

- (1) Batas wilayah Desa Menggala meliputi:
- a. Batas utara : Desa Pemenang Barat;
 - b. Batas timur : Desa Pemenang Timur;
 - c. Batas selatan : Kabupaten Lombok Barat;
 - d. Batas barat : Desa Malaka.
- (2) batas desa Menggala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik batas desa sebagai berikut:
- a. batas dengan Desa Malaka:
Telah disepakati sub segmen batas desa dimulai dari punggung bukit dengan titik TK.52.08.05.2004-52.08.05.0002-C00 koordinat 8°27'42.799"LS, 116° 4'9.512"BT mengarah ke utara mengikuti igir punggung bukit sampai pada kawasan perbukitan Baturuku dengan titik TK.52.08.05.2004-52.08.05.0002-52.08.05.2002-C26 koordinat 8°25'14.511"LS, 116°4'59.339"BT.
 - b. batas dengan Desa Pemenang Barat:
Dari titik kawasan bukit Baturuku dengan titik TK.52.08.05.2004-52.08.05.0002-52.08.05.2002-C26 koordinat 8°25'14.511"LS, 116°4'59.339" BT mengarah ke timur mengikuti koloh sampai pada gapura Dusun Montong Bae lalu dilanjutkan mengarah ke Timur melewati Sungai Lokok Bentek dan Persawahan sampai pada Koloh di bawah Bukit dengan titik TK.52.08.05.2001-52.08.05.2002-52.08.05.0002-A17 koordinat 8°25'24.783" LS, 116°5'59.251"BT.
 - c. batas dengan Desa Pemenang Timur
Dimulai Dari Batas Dengan Desa Pemenang Barat melalui Punggung Bukit Diatas Koloh Dengan Titik TK.52.08.05.2001-52.08.05.2002-52.08.05.0002-A17 koordinat 8°25'24.783" LS, 116°5'59.251"BT menuju arah tenggara mengikuti alur kontur lereng hingga menemui tebing curam di titik TK.52.8.05.0002-52.8.05.2001-A20 koordinat 8°26'3.635"LS, 116°6'4.202"BT sampai titik TK.52.8.05.0002-52.8.05.2001-A21 koordinat 8°26'11.172"LS, 116°6'9.752"BT kemudian menuju arah tenggara dengan mengikuti lekukan kontur lereng dan berakhir pada titik TK.52.8.05.0002-52.8.01.2005-52.8.05.2001-A24 koordinat 8°26'15.937"LS, 116°6'27.255"BT.
- (3) Batas wilayah Desa Menggala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 8

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa Menggala, dipilih dan disahkan seorang Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum terpilih Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kalinya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pegawai yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan dalam bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan it tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilantik bersamaan dengan diresmikannya Desa Menggala oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban yang sama dengan Kepala Desa.
- (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan antara lain:
 - a. menyelenggarakan pemerintahan Desa;
 - b. membentuk struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa;
 - c. mengangkat perangkat Desa;
 - d. memfasilitasi pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - e. membentuk lembaga adat dan pembentukan lembaga kemasyarakatan lainnya; dan
 - f. memfasilitasi pemilihan Kepala Desa serentak.

BAB V
ASET DESA

Pasal 9

- (1) Kepala Desa Pemenang Barat bersama Penjabat Kepala Desa Menggala menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan penyerahan aset kepada Pemerintah Desa Menggala.
- (2) Dalam hal penyelesaian inventarisasi dan penyerahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diselesaikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Penjabat Kepala Desa, maka pelaksanaan inventarisasi dan penyerahan aset dilakukan oleh Kepala Desa Menggala definitif.
- (3) Inventarisasi dan penyerahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi dan dikoordinasikan dengan Camat.
- (4) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Menggala yang berada dalam wilayah Desa Menggala.
- (5) Serah terima aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dalam bentuk penandatanganan berita acara serah terima.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Desa Menggala sebelum ditetapkannya APB Desa dibebankan pada APB Desa Pemenang Barat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara.
- (2) Pembiayaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Menggala dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Perangkat Desa dan anggota BPD yang melaksanakan tugas di Desa Pemenang Barat yang berdomisili di Desa Menggala menjadi perangkat Desa dan anggota BPD di Desa Menggala.
- (2) Pengisian kekurangan perangkat Desa dan anggota BPD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan tata cara pengisian perangkat desa dan keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 22 Juni 2020

BUPATI LOMBOK UTARA,

H. NAJMUL AKHYAR

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 22 Juni 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,**

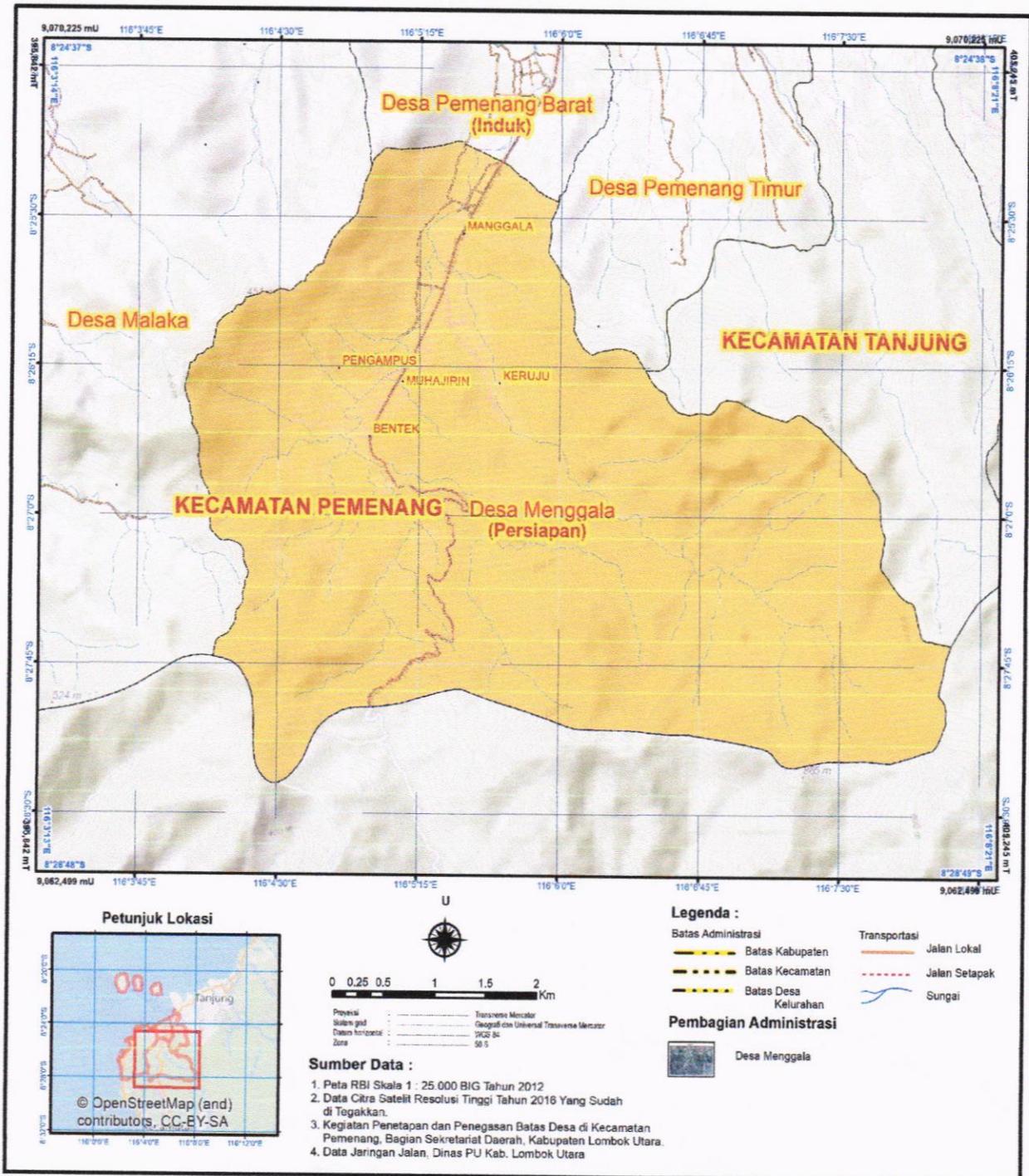
H. SUARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2020 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 63 TAHUN 2019

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara
 Nomor : 8 Tahun 2020
 Tanggal : 22 Juni 2020
 Tentang : Pembentukan Desa Menggala Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara

PETA BATAS DESA MENGGALA KECAMATAN PEMENANG
 KABUPATEN LOMBOK UTARA



KABUPATEN LOMBOK UTARA,

H. NAJMUL AKHYAR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA MENGGALA KECAMATAN PEMENANG
KABUPATEN LOMBOK UTARA

I. UMUM

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui yang dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka daerah dapat melakukan pembentukan desa dengan memekarkan Desa dengan persyaratan dan mekanisme sesuai dengan ketentuan.

Desa Menggala dibentuk melalui Desa Persiapan dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembentukan Desa Persiapan Menggala Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara. Melalui Desa Persiapan Menggala Pemerintah memberikan waktu untuk mempersiapkan dan membentuk Dasar dari berdirinya sebuah Desa yaitu, Pembentukan Struktur Organisasi, Pengangkatan Perangkat Desa Persiapan membangun Gedung Kantor Desa, penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa, mengelola anggaran operasional dari APB Desa Pemenang Barat serta melakukan pendataan di bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan.

Beberapa hal tersebut menjadi penilaian dan tolak ukur Pemerintah untuk memberikan Kode Desa untuk menetapkan Pembentukan Desa Menggala dengan Peraturan Daerah.

Pada tanggal 18 Juni 2020 Pemerintah Provinsi telah menyampaikan Kode Desa berdasarkan Surat dari Menteri Dalam Negeri Nomor 146/2554/BPD tanggal 12 Juni 2020 Perihal Penyampaian Kode Desa pada 10 (Sepuluh) Desa di Kabupaten Lombok Utara

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Menggala Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Jumlah pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan
Desa Menggala paling banyak 30% dari APB Desa
Pemanang Barat.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR 84